



Rp 10 M untuk Penataan Areal Civic Centre

Penataan di sebelah timur Pospol Renon itu nantinya ada permainan anak-anak, alat kebugaran, dengan taman yang asri.

DENPASAR, NusaBali

Masyarakat umum yang beraktivitas di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar (Lapangan Renon) akan makin dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas umum untuk rekreasi dan kebugaran. Kementerian Pekerjaan Umum menggelontor dana Rp 10 miliar untuk mempercantik area civic centre tersebut.

Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riadi dihubungi disela-sela nangkil di Pura Mandara Giri Semeru Agung, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (28/7) mengatakan, dana Rp 10 miliar tersebut diwujudkan dengan proyek penataan bangunan dan lingkungan. "Itu program pusat yang labelnya penataan bangunan dan lingkungan. Penataan ini sudah ada contohnya di Lapangan Puputan Badung Kota Denpasar," ujar Astawa Riadi.

Mantan Sekretaris BKD Pemprov Bali ini mengatakan penataan bangunan dan lingkungan yang dilakukan Kementerian PU ini berada di sebelah timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali yang dimulai dari Pospol Renon sampai di depan Konsulat Jepang, Jalan Raya Puputan Niti

Mandala Denpasar-Jalan Mohamad Yamin. "Saya lupa arealnya berapa itu. Tetapi proyeknya memang sudah mulai. Pagu anggarannya Rp 10 miliar dan sudah tuntas tahun depan," ujar birokrat asal Desa Lebih, Kecamatan Blahbatuh Gianyar ini.

Apa saja isinya dari proyek rekreasi dan hiburan ini? Astawa Riadi mengatakan ada permainan anak-anak, ada sepeda gantung untuk olahraga. Di kawasan ini juga diperindah dengan pohon perindang. "Sekarang kan kawasannya agak kumuh. Program pusat itu menata bangun dan dan lingkungan termasuk tempat parkir supaya tidak kumuh," ujar Astawa Riadi seraya menyebut pengerjaan proyek itu sekitar 6 bulan.

Menurut dia, kawasan yang ditata merupakan aset milik

Pemprov Bali. "Ada beberapa kawasan lagi yang akan ditata oleh pusat. Tetapi masih perencanaan. Kami di PU Bali ikut koordinasi saja. Kalau perencanaan penataan kawasan itu sepenuhnya kewenangan pusat," pungkas Astawa Riadi.

Sementara kalangan anggota DPRD Bali menyebutkan penataan ruang hijau terbuka dengan pusat rekreasi murah perlu lebih banyak dibuat untuk masyarakat di Denpasar. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Bali I Ketut Suwandi. Dikatakan, warga Denpasar sudah haus tempat hiburan yang murah dan ruang hijau terbuka. Karena makin habisnya lahan hijau, krama Bali butuh kawasan yang bisa menjadi tempat aktivitas murah. "Lapangan Puputan Margarana Renon setiap sore penuh.

Itu buktinya masyarakat butuh tempat nyaman untuk olahraga. Ya kawasan seperti ini perlu ditambah," ujar Suwandi.

Suwandi menyebutkan di Denpasar kini sudah dibuka banyak kawasan yang menjadi tempat rekreasi dan aktivitas warga kota. Seperti Lapangan Lumintang yang dibuka dan ditata untuk masyarakat. Ketika dirinya menjadi Wakil Ketua DPRD Denpasar usulan penataan kawasan kumuh untuk aktivitas warga ini menjadi usulan setiap tahun. Baru sekarang bisa mulai dilaksanakan. "Di Denpasar terutama di Lapangan Puputan Badung depan Pura Jagatnatha Denpasar kan sesak. Itu buktinya bahwa masyarakat memang kekurangan tempat hiburan," tegas politisi asal Banjar Sadmerta Kecamatan Denpasar Timur ini. **nat**

Edisi : Jumat, 29 Juli 2016

Hal : 3



Proyek PLTS di Baturinggit Mangkrak

AMLAPURA, NusaBali
Megaprojek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Banjar/Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Karangasem mangkrak. PLTS berkekuatan 1 MG VA yang diresmikan Menteri ESDM, Ir Jro Wacik pada 25 Februari 2013 sejak tiga tahun lebih tak terurus. Bahkan 18 inverter (pengubah arus DC ke AC) dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki.

Pantauan di lokasi PLTS Baturinggit, Kamis (28/7), tidak ada petugas jaga dan tidak ada petugas yang membersihkan panel surya (solar cell) yang berfungsi menyerap energi panas matahari. Seluruh aset itu masih milik pemerintah pusat dan belum dihibahkan ke Pemkab Karangasem. Sedangkan Pemkab Karangasem melalui Kabag Ekonomi Setda Karangasem, I Wayan Sutrisna, menolak menerima hibah karena di beberapa bagian ada kerusakan.

Sutrisna menerangkan, pada tahun 2015 telah bersurat ke pemerintah pusat untuk melaporkan kerusakan inverter. Dikatakan, Pemkab Karangasem menolak hibah aset itu sebelum pemerintah

pusat melakukan perbaikan. "PLTS itu telah menghasilkan setrum dan tersambung langsung ke jaringan induk PLN," ungkap Sutrisna. Untuk mengetahui daya yang dihasilkan, disarankan bertanya langsung ke PLN.

Disebutkan 18 inverter yang rusak dari 50 inverter yang digunakan. Harga 18 inverter itu sebesar Rp 800 juta. Diterangkan, kerusakan terjadi sejak 6 Juli 2015. PLTS Baturinggit telah memproduksi listrik 26.784 MVA atau 26.784 juta VA selama Maret 2013-Oktober 2015 dengan total pemasukan Rp 241,056 miliar. Hanya saja pemasukan ke PAD masih nihil karena aset masih dikuasai pusat.

Di Karangasem, ada 5 PLTS bantuan dari Kementerian ESDM. Sebanyak 4 PLTS asetnya telah dihibahkan ke Pemkab Karangasem dan telah pula diserahkan ke kelompok pengelola di masyarakat. Empat PLTS itu masing-masing PLTS berkekuatan 20 KVA dibangun pada tahun 2014 berlokasi di Banjar Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu. PLTS 15 KVA tahun 2013 di Banjar Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan

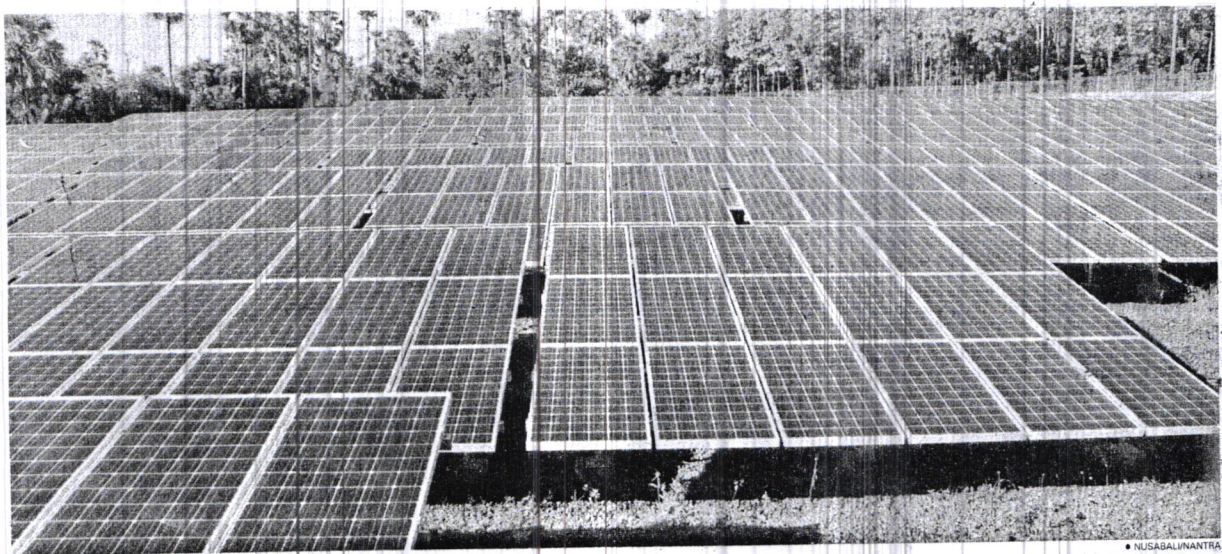
Kubu, PLTS 15 KVA tahun 2013 di Banjar Cegi, Desa Ban, Kecamatan Kubu, dan PLTS 15

KVA tahun 2013 di Desa Datah, Kecamatan Abang.
Terpisah, Deputi Manager

Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Wilayah IX Nusra, I Gusti Ketut Putra, membena-

rkan setrum yang diproduksi PLTS di Banjar/Desa Baturinggit langsung konek ke jaringan

induk PLN. "Setrum langsung konek, tetapi aset itu masih milik pusat," katanya. **k16**



Panel surya (solar cell) di Banjar/Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Karangasem yang telantar.

Edisi : Jumat, 29 Juli 2016

Hal : 8



Dewan Sahkan KUA PPASAPBD 2016 dan Empat Ranperda



Penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Badung Giri Prasta bersama Ketua Dewan Putu Parwata. Penandatanganan nota kesepakatan didampingi Wabup Ketut Suiasa dan Sekkab Badung Kompyang R. Swandika.

MANGUPURA, NusaBali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung mengesahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2016 dalam Sidang Paripurna, Kamis (28/7) sekitar pukul 14.00 Wita.

Sidang Paripurna kemarin dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata bersama wakilnya, I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta serta dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta Wakil I Ketut Suiasa. Sidang paripurna juga diikuti oleh 35 orang dari 40 anggota DPRD Badung. Sekkab Badung Kompyang R. Swandika beserta kepala SKPD di lingkungan Pemkab Badung juga hadir pada Sidang Paripurna kemarin.

Adapun empat Ranperda yang disahkan menjadi perda diantaranya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Terhadap APBD 2015, Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021, Ranperda Kabupaten Layak Anak dan Ranperda tentang Pencabutan Perda Badung No 3/2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa.

Terkait dengan KUA PPAS APBD 2016, menurut Putu Parwata, pengesahannya telah melalui serangkaian rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD Kabupaten Badung. Hasilnya, kata dia, APBD

Badung dirancang menjadi Rp 5.010.523.583.567,29. "Hasil pembahasan ini setelah ditetapkan menjadi kesepakatan bersama akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2017," kata Parwata.

Dalam Sidang Paripurna tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Badung Giri Prasta bersama Ketua Dewan Putu Parwata. Penandatanganan nota kesepakatan didampingi Wabup Ketut Suiasa dan Sekkab Badung Kompyang R. Swandika.

Sementara itu, Bupati Giri Prasta usai sidang menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh anggota DPRD Badung karena telah menyetujui lima rancangan perda menjadi perda.

Bupati asal Pelaga, Kecamatan Petang, ini juga menjelaskan bahwa dalam pembahasan KUA/PPAS antara eksekutif dan legislatif dalam perjalanannya telah terjadi sedikit perubahan sehingga belanja daerah bisa meningkat menjadi Rp5.010.523.583.567,29. "Astungkara, total belanja daerah yang telah disepakati yang nantinya jadi RAPBD telah mencapai angka Rp5.010.523.583.567,29," kata Giri Prasta.

Peningkatan belanja ini, lanjut dia didapat dari peningkatan pendapatan. Dimana dibidang pendapatan pihaknya menggenjot potensi-potensi pendapatan, mulai dari intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. "Astungkara, dengan sistem online yang akan kita optimalkan kebocoran pajak bisa diperkecil bahkan bisa nol persen," tegasnya. @ asa

Edisi : Jumat, 29 Juli 2016

Hal : 2